

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang di tetapkan. Pada tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Program / Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan terdiri dari pendahualuan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu, tuju, sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencan kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Bangkalan, 19 Pebruari 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 <b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	15
2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2021.....	16
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan .....	17
 <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	20
 <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	22
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja ( Renja ) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 inimerupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi da Misi Bupati Bangkalan, serta target dan sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena itu ada 4 Program prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan pelayanan kesekretariatan
2. Program peningkatan fasilitasi integrasi bangsa
3. Program fasilitasi hubungan antar lembaga

#### 4. Program pemantauan kajian strategis

Program tersebut diatas penting untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2021, karena program tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran Pembangunan Bangkalan tahun 2021.

Bangkalan, 22 Agustus 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan darivisi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai wujud dari kinerja 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

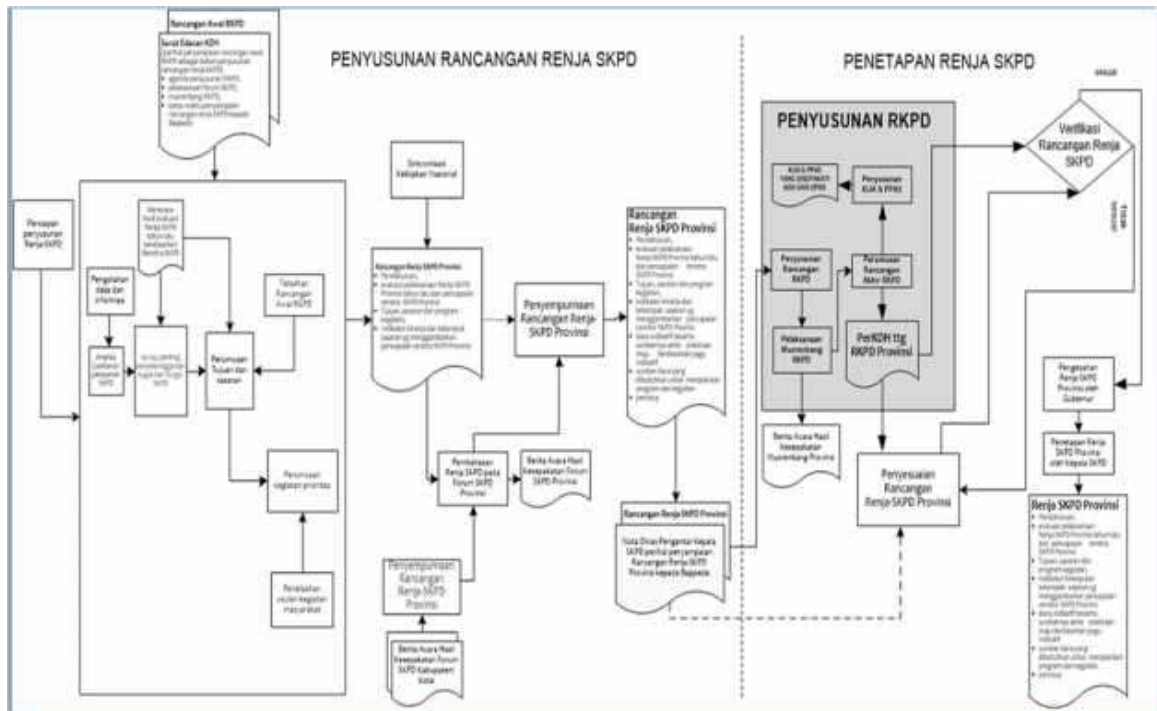
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

**Gambar.1**



**1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renjana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E)



8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 8/D).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pnjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor...)

### **1.3 Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021,dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran S ementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
  - a. Latar Belakang
  - b. Dasar Hukum Penyusunan
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Sistematika Penulisan
- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**
  - a. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
  - b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
  - c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
  - d. Review Terhadap RKPD 2021
  - e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
  - 3.1 Tabel Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
  - 3.2 Tabel Kesesuaian Perubahan Rencana Program
- **BAB IV PENUTUP**

LAMPIRAN :

Tabel 2.1 : Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Tabel 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3 : Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tabel 2.4 : Review Terhadap RKPD 2021

Tabel 2.5 : Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021

Tabel 3.1 : Perubahan Rencana Program dan Kegiatan 2021

Tabel3.2 : Kesesuaian Perubahan Rencana Program 2021

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LAU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja pembangunan badan kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan pada tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 dapat disimak penjelasan dibawah ini :

- Dari 5 program, kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian Realisasi yaitu :

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### KABUPATEN/KOTA

##### A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

##### *PERANGKAT DAERAH*

1. Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD

*C. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhann Barang Milik Daerah

*D. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

*E. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

*F. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAEARAH*

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya

*G. PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

*H. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH*

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bina Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

*A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN*

*PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER  
KEBANGSAAN*

2. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

**C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN  
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

*A. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN*

*PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA  
POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI  
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI  
POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK*

- ✓ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- ✓ Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

**D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**

*A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN*

*PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN*

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah

**E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

*A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN*

*PEMANTAPAN KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL*

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring dann Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah



F. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan rata-rata telah mencapai angka 100% yang meliputi 5 program yaitu :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,**
2. **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN,**
3. **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK,**
4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN,**
5. **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

➤ Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, seluruh program/kegiatan mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dengan menggunakan indikator capaian program dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 –2023. Dengan terpenuhinya target Renstra OPD yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan secara langsung terwujud dalam meningkatnya semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, meminimalisir konflik ditengah masyarakat, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik hal ini tentunya tertuang dalam tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor–factor penyebab terhambatnya pelaksanaan proram/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program ditahun berjalan. Kebijakan lain dalam optimalisasi pencapaian target Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 disesuaikan dengan Renstra SKPD baik dari sasaran, program dan kegiatan serta anggaran yang masih bertumpu pada indicator tahun sebelumnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun berjalan sebagaimana tertera dalam lampiran Tab

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk Standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan OPD meliputi 5 Program, 12 sub kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yaitu: yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dan 12 Kegiatan yang terdiri dari :

1. *PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*
2. *ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*
3. *ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*
4. *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*
5. *ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*
6. *PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*
7. *PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*
8. *PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*

9. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN  
PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN*
10. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN  
PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA  
POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN  
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN  
UMUM /PEMILIHAN UMUM KEPLA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN  
SITUASI POLITIK*
11. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN  
PELAKSANAAN DIBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN*
12. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN  
PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL*

*Dan 31 Sub Kegiatan Antara Lain :*

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  
Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
18. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan  
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bang
23. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela  
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan  
Sejarah Kebangsaan
24. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela  
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan  
Sejarah Kebangsaan
25. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela  
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan  
Sejarah Kebangsaan
26. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,  
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

27. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
28. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
29. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
30. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 2.2

### 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun issue – issue Strategis yang menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas SDM yang ada.
2. Menurunnya nilai – nilai luhur Budaya Bangsa dan Rasa Nasionalisme ( Bupak Babuh Guru Ratoh ).
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Bangkalan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan sebagai Berikut :

#### 1. Kedudukan

Badan Kasatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### 2. Tugas

Badan Kasatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan

#### 3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis di bidang Badan Kasatuan Bangsa dan Politik.
- ❖ Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- ❖ Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **2.4 Review Terhadap RKPD.**

Review terhadap RKPD 2021 sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 2.3



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam sub bab ini dikemukakan program/kegiatan Badan kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangkalan yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dalam Musrembang Desa dengan memperoleh masukan dan Usulan dari Musrembang Kecamatan. Selanjutnya Musrembang Kabupaten dari hasil usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan,Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai pengusul kegiatan.Usulan program dan kegiatan sangat penting dilaksanakan karena erat kaitannya dengan TUPOKSI dari Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bangkalan yang meliputi:

### 1. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,keuangan dengan rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program antara lain :

#### ❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### KABUPATEN/KOTA

##### 1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

###### *PERANGKAT DAERAH*

- a. Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### 2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD
3. *ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhann Barang Milik Daerah
4. *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*
- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. *ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*
- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. *PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*
- 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya
7. *PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*
- 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
  - 2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. *PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bina Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Bidang Kajian Strategi (KASTRA )**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan monitoring dan inspeksi terhadap kemungkinan timbul permasalahan permasalahan di bidang IPOLEKSOSBUD, melaksanakan penanganan masalah aktual dalam rangka kemauan pemahaman dan penegakan HAM, melaksanakan pemantauan kegiatan orang asing, NGO, dan lembaga asing di daerah bersama dengan instansi terkait dengan rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program yaitu :

❖ **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

1. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL*

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

### **3. Bidang Integrasi Bangsa (IB)**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang integrasi bangsa meliputi pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan dinamisasi masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang integrasi bangsa meliputi pembauran antar etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, adapun kegiatannya yang mendukung tercapainya program di bidang Integrasi Bangsa yaitu :

**❖ PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN  
KARAKTER KEBANGSAAN**

- ✓ *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN*
  - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

#### **4. Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL)**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas hubungan antar lembaga legislative, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik dan organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan serta pers, menyiapkan bahan pembinaan dan penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik serta pemberian rekomendasi di Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) adapun kegiatannya yang mendukung tercapainya program di bidang Hubungan Antar Lembaga yaitu :

- ❖ **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

✓ *PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK*

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

❖ **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

✓ *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN*

a. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 2.4

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan Nasional dan Provinsi yang berkaitan dengan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh dimana adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan politik yang wujudnya tidak kelihatan, namun dampaknya begitu dominan di masyarakat. Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang dianggap penting pada akhir-akhir ini, banyak dipelajari orang terutama dalam kaitannya dengan perkembangan suatu daerah / negara. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrassi, secara konseptual, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang / sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, selain itu tingkat partisipasi masyarakat berbeda – beda hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Umur, Jenis kelamin, Status ekonomi dan sosial, Pendidikan dan pekerjaan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Maksud penyusunan rencana kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 adalah sebagai pedoman penetapan kerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten yang erat kaitannya dengan pemerintah, masyarakat dan pihak – pihak terkait untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan yang sinergis dengan pembangunan secara nasional.



Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan digunakan sebagai instrumen dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan selama 1 tahun kedepan, dimana arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan tersebut untuk jangka waktu 1 tahun kedepan telah memenuhi target dan sasaran baik waktu dan sasaran yang dituju.

Dengan adanya Renja OPD kita akan tahu sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan yang sudah direncanakan itu Berhasil atau tidak dan sebagai review untuk tahun berikutnya agar program dan kegiatan yang direncanakan lebih berhasil dan secara langsung menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya yang membutuhkan.

Sasaran Renja OPD sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 3.1

## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk Standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan OPD meliputi 5 Program yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dan 12 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. *PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*
2. *ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*
3. *ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*
4. *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*
5. *ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*

6. *PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*
7. *PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*
8. *PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*
9. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN*
10. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM /PEMILIHAN UMUM KEPLA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK*
11. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DIBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN*
12. *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL*

***Dan 31 Sub Kegiatan Antara Lain :***

1. Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
18. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan  
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bang
23. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela  
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan  
Sejarah Kebangsaan

24. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
25. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
26. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
27. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
28. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah
29. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
30. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah.

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 4.1

Kesesuaian dan keselarasan dengan RKPD 2021: rencana program dan kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif termasuk pagu dana per program antara lain :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

✓ *PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT  
DAERAH*

1. Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dana : Rp. 20.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 1 dokumen

2. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD

Dana : Rp. 5.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 4 Dokumen

3. Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  
Kinerja SKPD

Dana : Rp. 5.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 8 Dokumen

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dana : Rp. 5.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 8 Laporan

✓ *ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana : Rp. 3.565.894.514,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 41 Orang

2. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Dana : Rp. 5.000.000,-
    - Lokasi : Kab Bangkalan
    - Target : 1 Laporan
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD
    - Dana : Rp. 5.000.000,-
    - Lokasi : Kab Bangkalan
    - Target : 7 Laporan
- ✓ *ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
    - Dana : Rp. 16.750.100,-
    - Lokasi : Kab Bangkalan
    - Target : 1 Laporan
- ✓ *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - Dana : Rp. 76.967.900,-
    - Lokasi : Kab Bangkalan
    - Target : 78 Orang
- ✓ *ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*
- 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Dana : Rp. 9.252.050,-
    - Lokasi : Kab Bangkalan
    - Target : 13 Jenis
  - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Dana : Rp. 58.169.700,-
    - Lokasi : Kab Bangkalan
    - Target : 4 Jenis
  - 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Dana : Rp. 20.994.000,-
    - Lokasi : Kab Bangkalan



Target : 3 Jenis

4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana : Rp. 30.947.290,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 2 Jenis

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undagan

Dana : Rp. 8.100.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 5 jenis

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dana : Rp. 76.498.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 158 Kali

✓ *PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH*

*DAERAH*

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya

Dana : Rp. 1.010.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 65 Unit

✓ *PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

Dana : Rp. 6.213.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 3 Jenis

2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana : Rp. 39.000.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 4 Jenis

3. Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana : Rp. 1.891.688.760,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 19 Jenis

✓ **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN**

**PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bina Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dana : Rp. 142.980.800,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 16 Unit

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

Dana : Rp. 16.750.100,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target :

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dana : Rp. 9.350.000,-

Lokasi : Kab Bangkalan

Target : 1 Unit

✓ **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER**

**KEBANGSAAN**

- **PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dana : Rp. ,-

Lokasi :

Target :

2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dana : Rp. 16.750.100,-

Lokasi :

Target :

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dana : Rp. 16.750.100,-

Lokasi :

Target :

✓ **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA  
SERTA BUDAYA POLITIK**

- *PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN  
DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN  
DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN  
dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK*

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Dana : Rp. 2.000.000.000,-

Lokasi : Kab. Bangkalan

Target : 3096 Orang, 2 Lembaga, 3 Dokumen, 480 Buah

2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  
Dana : Rp. 2.061.594.100,-  
Lokasi :Kab. Bangkalan  
Target : 20 Kali, 16 Lembag, 2 Dokumen

✓ **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**

**KEMASYARAKATAN**

- *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI*

**KEMASYARAKATAN**

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  
Dana : Rp.44.000.000 ,-  
Lokasi : Kab. Bangkalan  
Target : 13 Ormas, 80 Orang dan 2 Dokumen

✓ **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

- *PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL*

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah  
Dana : Rp. 36.663.000,-  
Lokasi : Kab . Bangkalan  
Target : 13 Orang

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

Dana : Rp. 500.000.000,-

Lokasi : Kab. Bangkalan

Target : 40 Orang

3. Pelaksanaan Monitoring dann Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

Dana : Rp. 3.337.000,-

Lokasi : Kab. Bangkalan

Target : 1 kali, 3 kecamatan



				Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	13	jenis	12	bln	12	bln	12	bln	100%	17	jenis	41	3,15	
				Jumlah jenis prasarana aparatur yang diadakan	30	unit	12	bln	12	bln	12	bln	100%			36	1,2	
0	0	16	6	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur yang diadakan											-		
0	0	16	7	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bintek / sosialisasi / seminar	2	keg											
0	0	16	8	Kegiatan Perencanaan Penyusunan dan Informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	1,5
				Jumlah Dokumen penganggaran PD yang tersusun	1	1 dok												
				Jumlah data dan informasi PD	1	data											-	
0	0	16	9	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kinerja PD	Jumlah Laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/BKPD)	1	data	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	3
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPD yang tersusun.	1	dok											-	
0	0	16	10	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan SKPD	1	dok			1	dok	1	dok	100%	1	dok	2	2
0	0	16	11	Kegiatan Fasilitas Hari Jadi	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka hari jadi Bangkalan	1	keg	1	keg	1	keg	1	keg	100%	1	keg	3	3
6	1	22		<b>Program Fasilitas Integrasi Bangsa</b>	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%

6	1	22	1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	18	kec	150	org	1096	orang	1096	org	100%	231	orang	1.477	82,05
6	1	22	2	Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pada masyarakat non PNS	18	kec										-	
					Jumlah peserta bela negara	115	orang	115	orang	115	orang	115	orang	100%	115	org	345	1,9
					Jumlah peserta pelatihan/penataran serta pembagian modul kader Bela Negara	18	keg											
6	1	22	3	Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas komponen (pemuda, pelajar)	Jumlah peserta Forum Pembauran Bangsa yg mendapatkan sosialisasi	150	orang			55	orang	55	org	100%	84	org	139	1
6	1	23		<b>Program Fasilitas Hubungan Antar Lembaga</b>	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol													
6	1	23	1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan	Jumlah lap.monev, belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	3
6	1	23	2	Penyuluhan kepada masyarakat ttg berpolitik	Jumlah peserta penyuluhan	140	orang	140	org	140	org	140	org	100%	140	org	420	3
6	1	23	3	Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Jumlah LSM	120	orang	125	org	120	org	120	org	100%	120	org	365	3,04
					Jumlah Orkemas yg terdaftar	1	dok											
					Laporan hasil pengawasan	1	dok										-	
6	1	23	4	Penyelenggaraan PEMILU	Laporan hasil dr pemilu PILEG dan PILPRES										1	kali		



					Laporan hasil pemilu PILKADES			1	kali								1	
					Laporan hasil dr pemilu PILGUBdan PILKADA	1	kali			1	kali	1	kali	100%			2	2
6	1	23	5	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik	Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik	1	kali	3	kali								3	3
					Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik													
					Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik												-	
6	1	23	6	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta fasilitasi bantuan keuangan parpol	30	orang	30	orgng	30	orgng	30	orgng	100%	30	orgng	90	3
6	1	24		<b>Program Pemantauan Kajian Strategis</b>	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	100%		100%		100%		100%	100%				100%	100%
6	1	24	1	Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi	35	orang	1	dok	105	orgng	105	orgng	100%	140	orgng	211	6,02
6	1	24	2	Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Government / NGO	Pemantauan terhadap orang asing dan lembaga asing	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	3
6	1	24	3	Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Dalam Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	2	kali	1	dok	2	kali	2	kali	100%	1	dok	5	2,5

6	1	24	4	Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi politik di daerah	Pemantauan PILKADA dan PILGUB	1	kali			1	dok	1	dok	100%				1	1
					Pemantauan PILEG dan PILPRES	1	kali												0
					Pemantauan PILKADES		-											-	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003











**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**Kabupaten Bangkalan**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan			100%	100%	100%	100%			100%	100%
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol			100%	100%	100%	100%			100%	100%
	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat			100%	100%	100%	100%			100%	100%

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003



<b>Catatan Analisis</b>
<b>13</b>

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Bangkalan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bangkalan	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bangkalan	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	100%		
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Bangkalan	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang <i>terpenuhi</i>	100%		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Bangkalan	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang <i>terpenuhi</i>	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 dok	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 dok	25.000.000	
2	Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD	Bangkalan	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	4 dok	5.000.000	Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD	Bangkalan	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	4 dok	6.612.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisasn Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisasn Realisasi Kinerja SKPD	8 dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisasn Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisasn Realisasi Kinerja SKPD	8 dok	6.612.500	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 lap	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 lap	6.612.500	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	3.565.894.514	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	4.715.895.495	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Lap	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Lap	6.612.500	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	7 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	7 Laporan	6.612.500	
7	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%		
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	16.750.100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	22.152.007	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dab Fungsi	Bangkalan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dab Fungsi	78 Orang	76.967.900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dab Fungsi	Bangkalan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dab Fungsi	78 Orang	172.500.000	
9	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	9.252.050	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	12.235.836	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	59.609.950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	78.834.159	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	20.994.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	27.764.565	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	30.947.290	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	40.927.791	
C	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Jenis	8.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Jenis	10.712.250	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158 Kali	76.496.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158 Kali	150.000.000	

13	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	100%		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65 Unit	56.388.150	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65 Unit	150.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	100%		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	100%	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	6.213.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	8.216.693
D	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	39.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	51.577.500
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Jenis	1.891.688.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Jenis	2.520.442.074
16	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	100%		<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	100%	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit	142.980.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit	189.092.108
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	9.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	12.365.375
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	45 Unit	14.820.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	45 Unit	19.599.450
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	100%		<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	100%	

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Bangkalan	<b>Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	100%		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Bangkalan	<b>Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	100%		
19	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	2 dok	540.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	2 dok	25.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	2 dok	540.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	2 dok	25.000.000	
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	50 orang	148.920.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	50 orang	70.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	100%		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	100%		

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Bangkalan	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3096 orang, 2 Lembaga, 3 Dokumen, 480 Buah	2.500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Bangkalan	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3096 orang, 2 Lembaga, 3 Dokumen, 480 Buah	2.000.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	Bangkalan	Jumlah penerima hibah yang di Monev	20 Kali, 16 Lembaga, 2 Dokumen	2.061.594.100	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	Bangkalan	Jumlah penerima hibah yang di Monev	20 Kali, 16 Lembaga, 2 Dokumen	250.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	100%		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	100%		
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Bangkalan	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	100%		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Bangkalan	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	100%		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bangkalan	Jumlah penerima hibah yang di Monev	13 Ormas, 80 Orang, 2 Dokumen	44.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bangkalan	Jumlah penerima hibah yang di Monev	13 Ormas, 80 Orang, 2 Dokumen	350.000.000	

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE KETERCAPIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI</b>	100%		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE KETERCAPIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI</b>	100%		
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Bangkalan	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100%		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Bangkalan	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100%		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Bangkalan	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	13 orang	36.663.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Bangkalan	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	13 orang	90.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Bangkalan	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	40 orang	500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Bangkalan	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	40 orang	350.000.000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s	Bangkalan	1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau 2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum	1 Kali, 3 Kecamatan	3.337.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s	Bangkalan	1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau 2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum	1 Kali, 3 Kecamatan	170.000.000	
--	---	-----------	---	---------------------	-----------	---	-----------	---	---------------------	-------------	--

















**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**kabupaten Bangkalan**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Bangkalan</b>	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	100%	Kesekretariatan
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Bangkalan	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Kesekretariatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 dok	Kesekretariatan
	Koordinasi dan Penyusunan PDA-SKPD	Bangkalan	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	4 dok	Kesekretariatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dok	Kesekretariatan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 lap	Kesekretariatan
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bangkalan</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%	Kesekretariatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	Kesekretariatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Lap	Kesekretariatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	7 Laporan	Kesekretariatan
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Bangkalan</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%	Kesekretariatan
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kesekretariatan
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Bangkalan</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%	Kesekretariatan



	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78 Orang	Kesekretariatan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>	100%	Kesekretariatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	Kesekretariatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Kesekretariatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	Kesekretariatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Kesekretariatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Jenis	Kesekretariatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158 Kali	Kesekretariatan
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang</b>	100%	Kesekretariatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65 Unit	Kesekretariatan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	100%	Kesekretariatan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	Kesekretariatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	Kesekretariatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Jenis	Kesekretariatan
	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bangkalan	<b>Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	100%	Kesekretariatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit	Kesekretariatan

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	Kesekretariatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	45 Unit	Kesekretariatan
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	100%	Bidang Integrasi Bangsa
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Bangkalan	<i>Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	100%	Bidang Integrasi Bangsa
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	2 dok	Bidang Integrasi Bangsa
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	2 dok	Bidang Integrasi Bangsa
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangkalan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	50 orang	Bidang Integrasi Bangsa
	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	100%	Bidang Hubungan Antar Lembaga
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Bangkalan	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	3096 orang, 2 Lembaga, 3 Dokumen, 480 Buah	Bidang Hubungan Antar Lembaga
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	Bangkalan	Jumlah penerima hibah yang di Monev	20 Kali, 16 Lembaga, 2 Dokumen	Bidang Hubungan Antar Lembaga

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	100%	Bidang Hubungan Antar Lembaga
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Bangkalan	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	100%	Bidang Hubungan Antar Lembaga
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bangkalan	Jumlah penerima hibah yang di Movev	13 Ormas, 80 Orang, 2 Dokumen	Bidang Hubungan Antar Lembaga
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Bangkalan	<b>PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI</b>	100%	Bidang Kajian Strategis
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Bangkalan	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100%	Bidang Kajian Strategis
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Bangkalan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti rapat rencana aksi	13 orang	Bidang Kajian Strategis
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Bangkalan	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	40 orang	Bidang Kajian Strategis
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Bangkalan	1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau 2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum	1 Kali, 3 Kecamatan	Bidang Kajian Strategis









RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	100%
8.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	100%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Bangkalan	1 dok	20.000.000	DAUM	Kesekretariatan	1 dok	25.000.000
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	Bangkalan	4 dok	5.000.000	DAUM	Kesekretariatan	4 dok	6.612.500
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisatr Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisatr Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	8 dok	5.000.000	DAUM	Kesekretariatan	8 dok	6.612.500
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	8 lap	5.000.000	DAUM	Kesekretariatan	8 lap	6.612.500
8.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	41 ASN	3.565.894.514	DAUM	Kesekretariatan	41 ASN	4.715.895.495
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Bangkalan	1 Lap	5.000.000	DAUM	Kesekretariatan	1 Lap	6.612.500
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	Bangkalan	7 Laporan	5.000.000	DAUM	Kesekretariatan	7 Laporan	6.612.500



8.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	
8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 Laporan	16.750.100	DAUM	Kesekretariatan	1 Laporan	22.152.007
8.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	78 Orang	76.967.900	DAUM	Kesekretariatan	78 Orang	172.500.000
8.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	13 Jenis	9.252.050	DAUM	Kesekretariatan	13 Jenis	12.235.836
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	4 Jenis	59.609.950	DAUM	Kesekretariatan	4 Jenis	78.834.159
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	3 Jenis	20.994.000	DAUM	Kesekretariatan	3 Jenis	27.764.565
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	2 Jenis	30.947.290	DAUM	Kesekretariatan	2 Jenis	40.927.791
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	5 Jenis	8.100.000	DAUM	Kesekretariatan	5 Jenis	10.712.250
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	158 Kali	76.496.000	DAUM	Kesekretariatan	158 Kali	150.000.000
8.01.01.2.09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	65 Unit	56.388.150	DAUM	Kesekretariatan	65 Unit	150.000.000
8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	

8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	3 Jenis	6.213.000	DAUM	Kesekretariatan	3 Jenis	8.216.693
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	4 Jenis	39.000.000	DAUM	Kesekretariatan	4 Jenis	51.577.500
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	19 Jenis	1.891.688.760	DAUM	Kesekretariatan	19 Jenis	2.520.442.074
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Kesekretariatan	100%	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	16 Unit	142.980.800	DAUM	Kesekretariatan	16 Unit	189.092.108
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	1 Unit	9.350.000	DAUM	Kesekretariatan	1 Unit	12.365.375
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Bangkalan	45 Unit	14.820.000	DAUM	Kesekretariatan	45 Unit	19.599.450
8.01.02	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Kebijakan yang ditindak lanjuti dalam kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Bidang Integrasi Bangsa	100%	
8.01.02.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Bangkalan	100%		DAUM	Bidang Integrasi Bangsa	100%	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	Bangkalan	2 dok	540.000	DAUM	Bidang Integrasi Bangsa	2 dok	25.000.000

8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	Bangkalan	2 dok	540.000	DAUM	Bidang Integrasi Bangsa	2 dok	25.000.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	Bangkalan	50 orang	148.920.000	DAUM	Bidang Integrasi Bangsa	50 orang	70.000.000
8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Bidang Hubungan Antar Lembaga	100%	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Bangkalan	3096 orang, 2 Lembaga, 3 Dokumen, 480 Buah	2.500.000.000	DAUM	Bidang Hubungan Antar Lembaga	3096 orang, 2 Lembaga, 3 Dokumen, 480 Buah	2.000.000.000
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	Jumlah penerima hibah yang di Monev	Bangkalan	20 Kali, 16 Lembaga, 2 Dokumen	2.061.594.100	DAUM	Bidang Hubungan Antar Lembaga	20 Kali, 16 Lembaga, 2 Dokumen	250.000.000

8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Bangkalan	100%		DAUM	Bidang Hubungan Antar Lembaga	100%	
8.01.04.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Bangkalan	100%		DAUM	Bidang Hubungan Antar Lembaga	100%	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah penerima hibah yang di Movev	Bangkalan	13 Ormas, 80 Orang, 2 Dokumen	44.000.000	DAUM	Bidang Hubungan Antar Lembaga	13 Ormas, 80 Orang, 2 Dokumen	350.000.000
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI</b>	Bangkalan	100%		DAUM	idang Kajian Strateg	100%	
8.01.06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Bangkalan	100%		DAUM	idang Kajian Strateg	100%	
8.01.06.2.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	Bangkalan	13 orang	36.663.000	DAUM	idang Kajian Strateg	13 orang	90.000.000

8.01.06.2.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	Bangkalan	40 orang	500.000.000	DAUM	Rencana Kajian Strategis	40 orang	350.000.000
8.01.06.2.04	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau 2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum	Bangkalan	1 Kali, 3 Kecamatan	3.337.000	DAUM	Rencana Kajian Strategis	1 Kali, 3 Kecamatan	170.000.000

|

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_

|

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan				Sasaran				
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Ket
		2020	2021			2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kasus sara / politik/bela negara yang terselesaikan	100%	100%		Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	100%	100%	
					Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol	100%	100%	
					Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	100%	100%	
					Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	90%	100%	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003





